

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama
- Afandi, Ali, 2002, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie, 2013, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana.
- Asnawi, M. Natsir, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Harahap, Yahya, 1991, *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata*, Bogor: Pendidikan Hakim Senior Angkatan ke I Tugu.
- , 2011, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kie, Tang Tong, 2000, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Makarao, Moh. Taufik, 2009, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1979, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Rasyid, Laila M., 2015, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Salim dan Syahrur, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Cipta Pustaka Indonesia.
- Samosir, Djamanat, 2011, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Samudra, Teguh, 2012, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung: Alumni.

Situmorang, Victor M dan Sitanggang, Cormentyna, 2005, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti, R., 2015, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Balai Pustaka.

Subekti dan Tjitro Sudibyo, R., 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung : Alfabeta.

Supomo, R., 1958, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Penerbit Fasco.

Tobing, G.H.S. Lumban, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.

2. Sumber Jurnal

Sunge, Maisara, “*Beban Pembuktian dalam Perkara Perdata*”, Jurnal Inovasi, Vol. 9, No. 2, 2012.

Demougin, Dominique dan Fluet, Claude, “*Preponderance of Evidence*”, European Economic Review 50, No. 4, 2006.

Umbas, Sita Arini, “*Kedudukan Akta dibawah tangan yang Telah Dilegalisasi Notaris Dalam Pembuktian di Pengadilan*”, Lex Crimen 6, No.1, 2017.

3. Sumber Skripsi

Pradnyana, Iga Bgs Agastya, 2017, “*Tanggung Jawab Notaris Atas Kebenaran Akta bawah tangan yang Dilegalisasi*”, Skripsi: Universitas Udayana. (Tidak dipublikasikan)

4. Sumber Perundang-undangan

RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

RI, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

RI, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

RI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

RI, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

RI, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

RI, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

